

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



Kota Serahkan Secara Simbolis
Keberayaan Di Kecamatan Pa



KECAMATAN PALARAN KOTA SAMARINDA

Nomor : 900/0143/400.02
Tanggal : 15 Januari 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-NYA Kecamatan Palaran Kota Samarinda dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024, sebagai perwujudan dari Laporan pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Palaran Kota Samarinda tahun 2021–2026, dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh perundangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Kecamatan Palaran Kota Samarinda dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kota Samarinda selama tahun anggaran 2024.

Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Palaran Kota Samarinda serta bermanfaat bagi seluruh Masyarakat di lingkungan Kecamatan Palaran Kota Samarinda untuk mendukung Pemerintah Kota Samarinda dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kota Samarinda.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 ini belum sempurna, untuk itu diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Semoga laporan ini bermanfaat khususnya bagi Kecamatan Palaran dalam upaya mewujudkan *Good Governance* dan juga pihak-pihak yang berkepentingan.

Samarinda, 15 Januari 2025



Muhammad Dahlan, S.STP., M.Si

Nip. 198005071999121001

RINGKASAN EKSEKUTIF



Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Kecamatan Palaran Kota Samarinda berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan serta memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja (*performance result*) tahun 2024

sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Sistematika penyajian Laporan untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai misi Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan dengan tujuan yang dijabarkan pada 2 (dua) Sasaran Strategis dimana untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan sebanyak 2 (dua) indikator kinerja, dengan didukung 3 (tiga) program dan 9 (sembilan) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan.

Dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut Kecamatan Palaran Kota Samarinda tahun 2024 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 35.898.593.985,00 yang telah direalisasi sebesar Rp. 35.585.343.360,00 atau realisasi dan capaiannya sebesar 99,13%.

Hasil pencapaian kinerja tahun 2024 menunjukkan bahwa secara keseluruhan Kecamatan Palaran telah melaksanakan seluruh sasaran staregis yang ditargetkan dalam rencana strategis dan rencana kinerja, meskipun belum sepenuhnya berhasil dilaksanakan karena terdapat beberapa hambatan. Namun demikian keberhasilan yang telah memberikan pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga bagi Kecamatan Palaran untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang sebagai tolak ukur untuk menentukan langkah - langkah kebijakan Kecamatan Palaran yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Dasar Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Organisasi	3
C. Struktur Organisasi.....	5
D. Sumber Daya Kecamatan Palaran	6
E. Aspek Strategis Dan Permasalahan.....	15
F. Hasil Dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023	16
G. Sistematika Penulisan	19

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis	20
B. Penetapan/Perjanjian Kinerja	28

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi	34
B. Realisasi Anggaran	48
C. Prestasi/Penghargaan	55
D. Penilaian Kinerja Organisasi	80

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran	86

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2024
4. Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah Penduduk Per Kelurahan	9
Tabel 1.2.	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Klasifikasi Aparatur	10
Tabel 1.3.	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	10
Tabel 1.4.	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jenis Kelamin	11
Tabel 1.5.	Sarana dan Prasarana di Kecamatan Palaran.....	12
Tabel 2.1.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Kecamatan Palaran ...	25
Tabel 3.1.	Nilai dan Kategori Predikat Evaluasi AKIP	57
Tabel 3.2.	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	59
Tabel 3.3.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2024	60
Tabel 3.4.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2024	62
Tabel 3.5.	Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini denganTahun Lalu	64
Tabel 3.6.	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah ...	65
Tabel 3.7.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kecamatan Palaran	68
Tabel 3.8.	Pengukuran Efisiensi Penggunaan Anggaran Untuk Sasaran Strategis 1	70
Tabel 3.9.	Pengukuran Efisiensi Penggunaan Anggaran Untuk Sasaran Strategis 2	70
Tabel 3.10.	Realisasi Anggaran Program Dan Kegiatan Tahun 2024	72
Tabel 3.11	Koreksi Capaian Perjanjian Kinerja berdasarkan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	82
Tabel 3.12	Penilaian Kinerja Organisasi Kecamatan Palaran Tahun 2024	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa, oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ataurakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan good governance dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan

informasi kinerja diintegrasikan kedalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan dibawahnya. Dengan demikian ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui *cost efficiency* dan *cost effectiveness* anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (*Good Governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Bertitik tolak dari RENSTRA Kecamatan Palaran Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Palaran Tahun 2024 dan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta memperhatikan Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2024 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran, dengan demikian LKjIP Kecamatan Palaran menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Walikota kepada Presiden ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Pemerintah Kecamatan Palaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat, keterbukaan, profesionalitas dan akuntabilitas.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Palaran. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2024 yaitu tahun keempat RENSTRA Kecamatan Palaran Tahun 2021-2026.

B. Dasar Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi

1. Pembentukan

Pembentukan Kecamatan Palaran berdasarkan Peraturan daerah nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Samarinda .

2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dan menjalankan kewenangannya sesuai yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai Peraturan Walikota Samarinda No. 24 Tahun 2014 Tanggal 22

September 2014 Tentang Penjabaran Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, organisasi Kecamatan adalah merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mensukseskan perencanaan pembangunan dilingkup Kecamatan, sekaligus melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penerapan serta penegakan peraturan perundang – undangan dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum baik dengan pihak swasta maupun dengan instansi terkait;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kecamatan dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan instansi vertikal agar bersinergis;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan dalam upaya memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi serta pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja kecamatan;

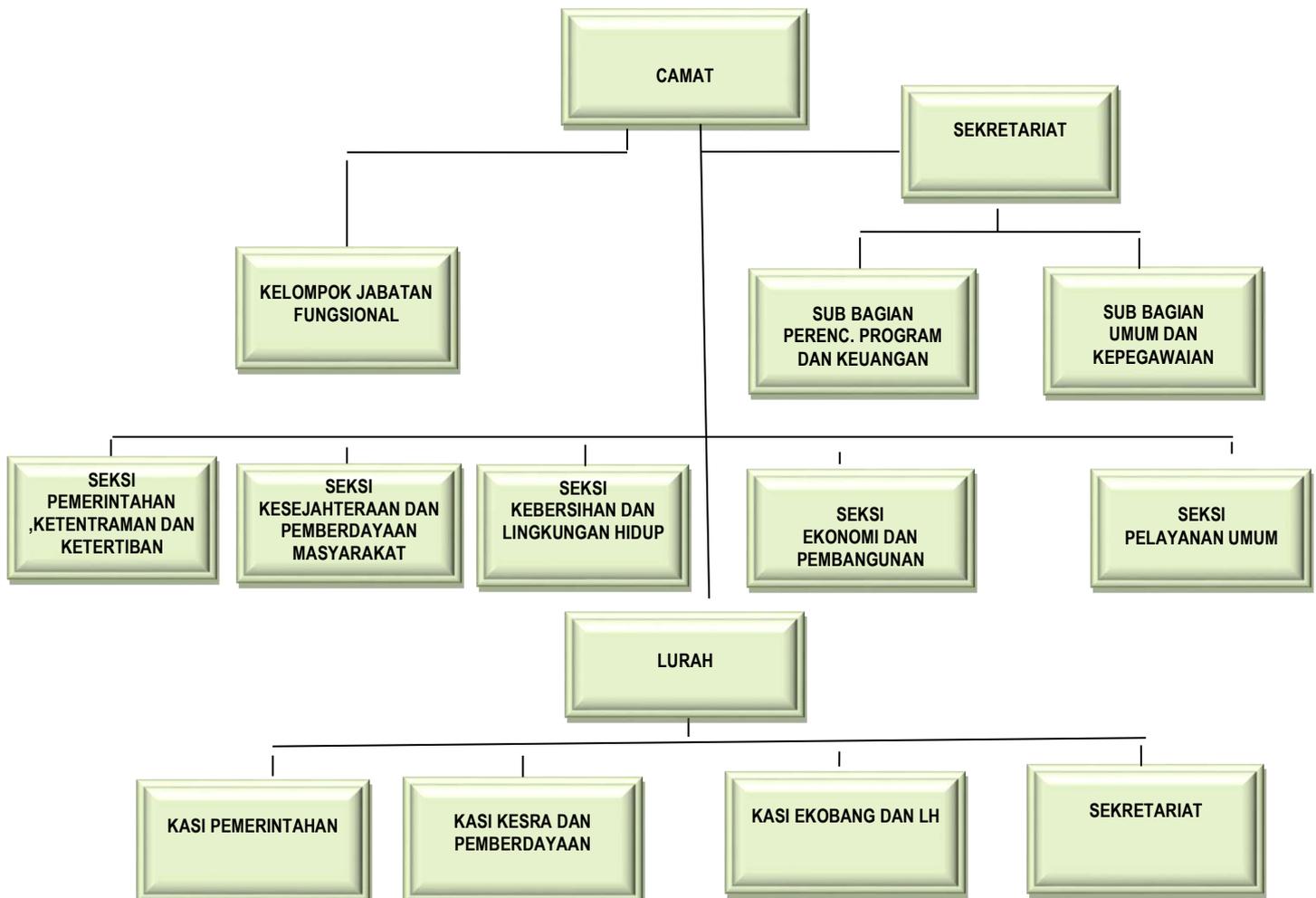
- i. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan
- j. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Struktur Organisasi

Dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda, Struktur Organisasi di Kecamatan, terdiri dari :

1. Kecamatan;
2. Sekretariat Kecamatan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;
4. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
7. Seksi Pelayanan Umum;
8. Kelurahan, membawahkan:
 - a. Sekretariat Kelurahan;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - d. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

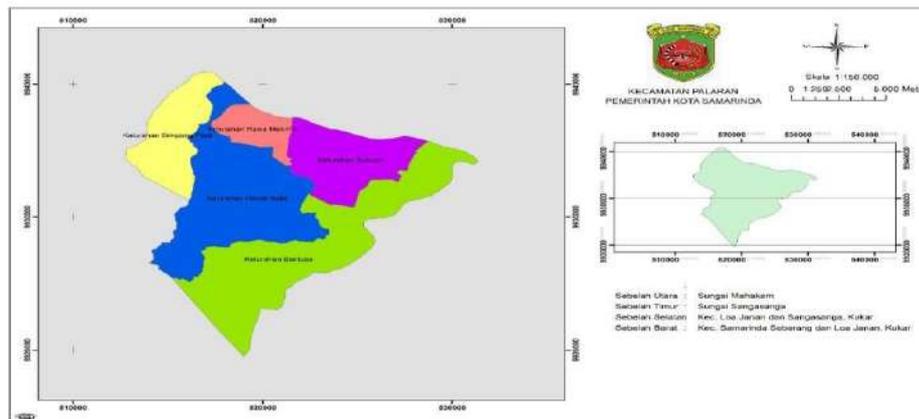
Bagan struktur organisasi Kecamatan Palaran berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda dapat diilustrasikan pada struktur organisasi berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN PALARAN****D. Sumber Daya Kecamatan Palaran****1. Kondisi dan Letak Geografis**

Kecamatan Palaran sebagai salah satu dari 10 kecamatan yang berada di wilayah Kota Samarinda mempunyai luas wilayah 221,29 km², dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan Sungai Mahakam
- Timur : Berbatasan dengan Sungai Mahakam
- Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Sanga-Sanga
- Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Samarinda Seberang

Gambar 1 : Peta Wilayah Kecamatan Palaran



Kecamatan Palaran terbagi menjadi 5 (lima) kelurahan, yaitu :

1. Kelurahan Rawa Makmur
2. Kelurahan Bukuan
3. Kelurahan Handil Bakti
4. Kelurahan Simpang Pasir
5. Kelurahan Bantuas

Secara Morfologi Kecamatan Palaran merupakan daerah yang bergelombang, berbukit dan bergunung. Bagian utara merupakan tanah datar dan berbukit, bagian timur merupakan tanah datar serta bergunung dan daerah aliran sungai Mahakam. Sementara bagian selatan merupakan tanah berbukit dan bergunung, sedangkan bagian barat adalah daerah bergelombang, berbukit serta bergunung.

Kecamatan Palaran terletak di garis Khatulistiwa sehingga karakteristik iklimnya termasuk iklim Tropika Basah (*Tropika Humida*) dengan ciri khas curah hujan tinggi dengan penyebaran yang merata sepanjang tahun. Dengan demikian tidak terdapat pergantian musim yang jelas antara musim kemarau dan musim hujan.

Sesuai dengan kondisi iklim di Kota Samarinda yang tergolong dalam tipe iklim Tropika Humida, maka jenis-jenis tanah yang terdapat di daerah inipun tergolong kedalam tanah yang bereaksi masam. Sesuai dengan kondisi iklim di Kota Samarinda yang tergolong dalam tipe iklim Tropika Humida, maka jenis-jenis tanah yang terdapat di daerah inipun tergolong kedalam tanah yang bereaksi masam. Jenis Tanah di Kecamatan Palaran terdiri dari jenis tanah: Podsolik, Alluvial, dan Organosol. Tanah Podsolik (Ultisol) merupakan jenis tanah untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian.

Persediaan air di daerah tanah ini umumnya cukup tersedia dari curah hujan yang tinggi. Penggunaan tanah dari jenis tanah ini sebagai daerah pertanian, biasanya memungkinkan produksi yang baik pada beberapa tahun pertama selama unsur- unsur hara di permukaan belum habis melalui proses biocycle. Potensi Sumber Daya Air yang menonjol adalah Sungai Mahakam dan sungai-sungai yang berada di wilayah Kecamatan Palaran.

Sampai dengan akhir 2024 jumlah rumah tangga pengguna air bersih sebanyak 6.826 KK, sisanya menggunakan sumur gali dan sebagian masih menggunakan air dari sungai Mahakam secara langsung untuk kegiatan rumah tangganya. Hal ini disebabkan sambungan langsung PDAM belum terpasang ke seluruh rumah tangga dan sebagian wilayah belum terpasang pipa induk

Jumlah penduduk Kecamatan Palaran pada akhir bulan Desember 2024 berjumlah ± 65.199 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 33.531 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 31.668 jiwa. Jumlah penduduk per kelurahan di Kecamatan Palaran sebagaimana tersebut dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk per Kelurahan se Kecamatan Palaran Tahun 2024

No	Kelurahan	Σ RT	Jumlah Penduduk		Jumlah	%
			Laki	Perempuan		
1.	Rawa Makmur	52	12.003	11.440	23.443	37%
2.	Bukuan	47	8.802	8.170	16.972	26%
3.	Handil Bakti	32	5.489	5.189	10.678	16%
4.	Simpang Pasir	25	4.823	4.539	9.362	14%
5.	Bantuas	14	2.414	2.330	4.744	7%
	Jumlah	168	33.531	31.668	65.199	100%

Sumber Data : Seksi Pemerintahan & Trantib Kec. Palaran 2024

Berdasarkan tabel diatas, maka sebaran jumlah penduduk terbanyak ada di Kelurahan Rawa Makmur sebesar 37% dan terendah di Kelurahan Bantuas sebesar 7%.

2. Sumber Daya Aparatur

Sampai dengan akhir Desember Tahun 2024 sumber daya aparatur di Kecamatan Palaran sebanyak 52 (lima puluh satu) orang terdiri dari 51 orang PNS, 12 orang PTTB dan 34 orang PTTH, dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.2
Sumber Daya Aparatur Kecamatan Palaran
Berdasarkan Klasifikasi Aparatur

NO	UNIT KERJA	KLASIFIKASI			JUMLAH
		PNS	PTTB	PTTH	
1	Kecamatan Palaran	13	4	11	28
2	Kelurahan Rawa Makmur	8	1	5	14
3	Kelurahan Bukuan	8	5	2	15
4	Kelurahan Handil Bakti	8	0	7	15
5	Kelurahan Simpang Pasir	6	0	4	10
6	Kelurahan Bantuas	8	2	5	15
	Total	51	12	34	97

Sumber daya aparatur berdasarkan tingkat pendidikan tercantum pada tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.3
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN				JUMLAH
		SMA	DIPLOMA	S1	S2	
1	Kecamatan Palaran	14	1	10	3	28
2	Kelurahan Rawa Makmur	6		8		14
3	Kelurahan Bukuan	8		7		15
4	Kelurahan Handil Bakti	8		7		15
5	Kelurahan Simpang Pasir	4		6		10
6	Kelurahan Bantuas	8		7		15
	TOTAL	48	1	45	3	97

Tabel 1.4
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	Kecamatan Palaran	16	12	28
2	Kelurahan Rawa Makmur	9	5	14
3	Kelurahan Bukuan	12	3	15
4	Kelurahan Handil Bakti	9	6	15
5	Kelurahan Simpang Pasir	6	4	10
6	Kelurahan Bantuas	10	5	15
	TOTAL	62	35	97

3. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Palaran dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, kendaraan dinas, rumah dinas camat dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya masih dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sampai dengan akhir Desember 2024 sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Palaran adalah seperti pada tabel berikut.

Tabel 1.5
Sarana dan Prasarana di Kecamatan Palaran

NO	JENIS ASET	STATUS			JUMLAH
		BAIK	SEDANG	RUSAK	
1	MEJA KERJA ESSELON	√			1
2	KUSRI KERJA ESSELON	√			1
3	KUSRI TAMU	√			1
4	KURSI TAMU	√			1
5	AC	√			1
6	LEMARI ES	√			1
7	LEMARI ARSIP	√			1
8	LEMARI KACA	√			1
9	MEJA EXPO	√			1
10	MEJA KERJA ESSELON	√			1
11	KUSRI KERJA ESSELON	√			1
12	KUSRI TAMU	√			1
13	KURSI TAMU	√			1
14	AC	√			1
15	LEMARI ES	√			1
16	KOMPUTER	√			
17	PRINTER	√			
18	AC	√			1
19	Komputer	√			3
20	Komputer	√			1
21	Printer	√			1
22	Printer	√			1
23	Printer	√			1
24	Kursi	√			5
25	Lemari	√			1

NO	JENIS ASET	STATUS			JUMLAH
		BAIK	SEDANG	RUSAK	
26	Scan	√			1
27	MEJA KERJA	√			4
28	AC	√			1
29	PRINTER	√			3
30	DISPENSER	√			1
31	KURSI KERJA	√			3
32	KURSI TUNGGU	√			1
33	KOMPUTER	√			2
34	KOMPUTER	√			1
35	MESIN SCEN	√			1
36	LEMARI ARSIP KACA	√			1
37	LEMARI ARSIP	√			1
38	Komputer	√			1
39	Printer	√			2
40	Printer	√			1
41	Meja	√			6
42	Kursi	√			10
43	Lemari Arsip	√			10
44	Lemari	√			1
45	SCANNER	√			
46	Komputer	√			
47	AC	√			
48	AC			√	
49	KOMPUTER	√			2
50	PRINTER	√			1
51	AC	√			1

NO	JENIS ASET	STATUS			JUMLAH
		BAIK	SEDANG	RUSAK	
52	LEMARI ARSIP	√			1
53	MEJA	√			4
54	Kursi	√			4
55	LEMARI ARSIP	√			1
56	AC	√			1
57	AC	√			1
58	DISPENSER	√			1
59	MEJA	√			1
60	PRINTER	√			1
61	KOMPUTER	√			1
62	Kursi	√			1
63	LEMARI ARSIP	√			1
64	KURSI TUNGGU	√			4
65	KURSI	√			6
66	KOMPUTER	√			1
67	PRINTER	√			1
68	MEJA	√			3
69	KURSI	√			2
70	KURSI	√			2
71	KURSI	√			1
72	LEMARI AESIP	√			2
73	AC	√			

Dengan sarana dan prasarana yang dimiliki tersebut secara faktual diharapkan mampu menunjang kegiatan baik administrasi maupun operasional kegiatan, khususnya pelayanan publik di Kantor Kecamatan Palaran dapat berjalan sebagaimana mestinya, mengingat luasnya wilayah dan padatnya volume kegiatan yang dilaksanakan.

E. Aspek Strategis dan Permasalahan

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan :

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain atau instansi teknis dalam pelaksanaan Pembangunan;
2. Pemenuhan sarana dan prasarana kerja di kecamatan dan kelurahan untuk menunjang kegiatan pelayanan public;
3. Pelayanan prima, kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kota Samarinda yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yaitu pelayanan yang cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta tatanan atau yang berlaku;
4. Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai factor penting, maka aparatur;
5. Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam Pembangunan sehingga menghasilkan program Pembangunan yang responsive gender

Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Palaran dipengaruhi oleh faktor internal dan factor eksternal sebagai berikut :

1. Tuntutan Perbaikan Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2009;
2. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam pembangunan;
3. Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta keselarasan perencanaan pembangunan wilayah Kecamatan pada tingkat pemerintahan;
4. Optimalisasi pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah;
5. Ketersediaan sumber daya pemerintahan baik SDM aparatur dan sistem informasi pelayanan publik yang proporsional sesuai kebutuhan ideal;

F. Hasil dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023

1. Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Palaran Tahun 2023

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah kegiatan analisis yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah yang dilakukan secara sistematis dan menyeluruh.

Tujuan evaluasi AKIP mengetahui capaian kinerja instansi pemerintah, menemukan permasalahan dan memberikan solusi, meningkatkan pelayanan publik, mempercepat reformasi birokrasi, dan memantau perkembangan kinerja instansi pemerintah. Aspek yang dinilai dalam evaluasi AKIP Efektivitas, Efisiensi, Responsivitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023 menunjukkan kategori **BB (Sangat Baik) dengan nilai sebesar 76,50**. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada Kecamatan Palaran Kota Samarinda, sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Progres nilai AKIP Kecamatan Palaran dari tahun 2020-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 1. 5
Progres Nilai AKIP Kecamatan Palaran Tahun 2020 - 2023

No.	Tahun	Nilai	Kategori
1	2021	60,00	B
2	2022	65,50	B
3	2023	76,50	BB

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023

Dalam laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2023 terdapat 13 (tiga belas) permasalahan dan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan. Tindak lanjut dari hasil evaluasi AKIP tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam matriks tindak lanjut hasil evaluasi AKIP tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 1.6

Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 dan Tindak Lanjutnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Diagram Crosscutting belum ada	Membuat Diagram Crosscutting
2	Matrik tindak lanjut LKE AKIP Tahun 2022 Komponen Perencanaan Kinerja dan bukti dukung belum ada.	Membuat matrik tindak lanjut LHE AKIP Tahun 2022
3	Notulen rapat monev belum menyajikan analisa penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.	Membuat notulen rapat monev yang menyajikan analisa penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
4	Notulen rapat monev belum menyajikan analisa penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja	Membuat notulen rapat monev yang menyajikan analisa penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja
5	Notulen rapat monev belum menyajikan analisa penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja	Membuat notulen rapat monev yang menyajikan analisa penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja
6	Penilaian prestasi pegawai per triwulan belum ada dan belum diupload.	Membuat dan mengupload penilaian prestasi pegawai per triwulan
7	Notulen rapat monev dan pelaporan kinerja, daftar hadir, dokumentasi, undangan dan seluruh dokumen kinerja yang ditandatangani oleh pimpinan belum diupload.	Mengupload notulen rapat monev dan pelaporan kinerja, daftar hadir, dokumentasi, undangan dan seluruh dokumen kinerja yang ditandatangani oleh pimpinan.
8	Notulen rapat pembahasan capaian kinerja yang dihadiri seluruh pegawai, undangan, daftar hadir, dokumentasi belum diupload.	Mengupload notulen rapat pembahasan capaian kinerja yang dihadiri seluruh pegawai, undangan, daftar hadir, dokumentasi.
9	Laporan monev per triwulan belum dimanfaatkan untuk penyesuaian aktivitas	Memanfaatkan laporan monev per triwulan untuk penyesuaian aktivitas
10	Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum diupload	Mengupload Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
11	Lembar kerja evaluasi dan laporan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah belum diupload.	Lembar kerja evaluasi dan laporan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah belum diupload.
12	Laporan evaluasi capaian kinerja belum dilengkapi dengan bukti rapat evaluasi (undangan, daftar hadir, notulen rapat), kertas kerja evaluasi dan dokumen pendukung	Melengkapi laporan evaluasi capaian kinerja dengan bukti rapat evaluasi (undangan, daftar hadir, notulen rapat), kertas kerja evaluasi dan dokumen pendukung

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
13	Matrik tindak lanjut atas rekomendasi hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) internal belum dibuat dan belum diupload.	Membuat dan mengupload matrik tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) internal.

G. Sistematika Penyajian

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi
- C. Struktur Organisasi
- D. Sumber Daya Aparatur
- E. Aspek Strategis dan Permasalahan
- F. Hasil dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023

Bab II Perencanaan Kinerja

- A. Rencana Strategis
 1. Visi dan Misi
 2. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja
 3. Strategi dan Kebijakan
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Prestasi/Anggaran
- D. Penilaian Kinerja Organisasi

Bab IV Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Langkah Perbaikan

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2024
4. Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang berisi strategi dan arahan untuk mencapai tujuan organisasi. Renstra disusun untuk membantu organisasi dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan.

Rencana strategis merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi dan kebijakan yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan penetapan visi dan misi serta perencanaan strategis yang tepat diharapkan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi.

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana dan bagaimana suatu pemerintahan harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu pemerintahan. Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan.

Visi Kota Samarinda telah dirumuskan dalam RENSTRA Kecamatan Palaran Tahun 2021-2026 adalah :

“Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban”

Makna dari Visi tersebut adalah Samarinda sebagai Kota pusat peradaban yang menciptakan tatanan politik, ekonomi, dan masyarakat yang harmonis, dan toleran menuju masyarakat madani. MADANI sebagai akronim dari kata maju, berbudaya dan harmoni dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sebuah kota Maju yang ekonomi daerah mandiri ditandai dengan berkembangnya sector ekonomi rakyat yang produktif dan kreatif didukung infrastruktur modern, dengan tata ruang yang aman dan nyaman.
2. Samarinda sebagai kota Sungai (*the spirit or river city*) yang berbudaya, ditandai dengan warga sipil dan aparat yang sehat, cerdas dan religious yang menjunjung tinggi etika, moralitas dan kejujuran dalam semangat persatuan dan kegotong royongan yang tinggi.
3. Kota yang selalu menjaga hubungan harmoni antar warga dan warga dengan lingkungan dalam suatu system kemasyarakatan dan lingkungan kota yang asri dan lestari.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan ditempuh pemerintah daerah untuk mewujudkan visi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi (instansi pemerintah) sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi pada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Misi dan Visi akan mendorong alokasi sumber daya di seluruh organisasi, sehingga kedua ungkapan tersebut harus selaras

dengan tugas, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan organisasi pemerintah.

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana tersebut diatas, maka ditetapkan beberapa Misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kota Samarinda. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi Pemerintah Kota Samarinda sebagai berikut :

- Misi Pertama : Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya
- Misi Kedua : Mewujudkan perekonomian kota yang maju, Mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan
- Misi Ketiga : Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi
- Misi Keempat : Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern
- Misi Kelima : Mewujudkan lingkungan kota aman, nyaman harmoni dan lestari

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka misi yang harus dilaksanakan oleh kecamatan adalah misi 3 dari visi dan misi yang telah ditetapkan yaitu

**“Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Transparan,
Akuntabel, dan Bebas Korupsi”**

Dengan pernyataan misi yang ditetapkan ini diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Kecamatan Palaran dan mengetahui alasan keberadaan dan perannya lebih dalam.

Makna dari Misi tersebut adalah :

1. Profesional, meningkatkan kemampuan penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan dengan ramah, mudah, cepat dan tepat waktu dengan menerapkan etika pelayanan publik.
2. Transparan, bersifat terbuka, melalui penyediaan informasi yang mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
3. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, baik kepada publik maupun kepada atasan atau pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Bebas Korupsi, tidak menyalahgunakan wewenang atau kepercayaan yang diamanahkan untuk kepentingan pribadi dan tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi dengan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah pelaksanaan program dan aktivitas dalam melaksanakan pencapaian misi.

Dengan mengacu pada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis Renstra Kecamatan Palaran tahun 2021-2026 ditetapkan tujuan yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan Palaran yaitu :

1. Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat
2. Meningkatnya Pelayanan Pelayanan Yang Akuntabel

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kecamatan Palaran dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran yang akan dicapai Kecamatan Palaran yaitu :

1. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD
2. Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran atau tolak ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi, unit kerja, atau individu. IKU digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Palaran adalah :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Persentase terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dapat dilihat dari tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kecamatan Palaran

Visi : Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban			
Misi : Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat;			
Tujuan		Sasaran	Indikator
1.	Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya kinerja dan pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat
2.	Meningkatnya Pelayanan Pelayanan Yang Akuntabel	Meningkatnya kualitas hidup, kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan	Persentase terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien. Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran (kebijakan, program dan kegiatan) secara optimal.

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien, strategi dan arah kebijakan di Kecamatan Palaran sebagai berikut

**Strategi Meningkatnya Sistem Pelayanan Publik
Arah Kebijakan Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
yang Lebih Baik**

Untuk meningkatkan sistem pelayanan publik, strategi dan arah kebijakan yang efektif meliputi :

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan publik, mempercepat proses administrasi, meningkatkan transparansi, fleksibel dan memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat.
2. Penyederhanaan Prosedur dan Efisiensi
Sederhanakan prosedur pelayanan agar lebih cepat dan mudah dipahami oleh masyarakat.
3. Peningkatan Kualitas SDM
Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan kepada petugas pelayanan publik agar memiliki kompetensi yang memadai
4. Transparansi dan Akuntabilitas
Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pelayanan publik
5. Partisipasi Masyarakat
Mendengarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat terkait kebutuhan dan harapan mereka
6. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan
Melakukan evaluasi secara rutin terhadap kinerja pelayanan publik dan identifikasi area yang perlu ditingkatkan.

Strategi Reformasi Birokrasi dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

Arah Kebijakan Memantapkan Sinkronisasi Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Reformasi birokrasi penguatan tata kelola pemerintahan dengan arah kebijakan memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pembangunan, dengan mengintegrasikan semua tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian melalui koordinasi yang baik, antara lain :

1. Perencanaan

- Perencanaan pembangunan daerah harus terintegrasi dengan perencanaan nasional dan daerah lain, serta mempertimbangkan potensi dan sumber daya daerah.
- Perencanaan pembangunan daerah harus melibatkan partisipasi masyarakat dan berbagai pihak terkait.
- Perencanaan Pembangunan daerah harus mencakup perencanaan jangka Panjang, menengah, dan tahunan.
- Perencanaan pembangunan daerah harus didukung oleh data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Penganggaran

- Penganggaran harus selaras dengan rencana Pembangunan daerah, memastikan alokasi anggaran tepat sasaran dan efisien, didasarkan pada kebutuhan pembangunan daerah yang telah diidentifikasi dalam perencanaan, transparan dan akuntabel.

3. Pelaksanaan

- Pengendalian bertujuan untuk memastikan pencapaian sasaran, dan target Pembangunan melalui pemantauan, evaluasi dan pengendalian kinerja, serta melibatkan berbagai pihak terkait, pemerintah daerah, Masyarakat dan Lembaga pengawas.

4. Sinkronisasi

- Sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian sangat penting untuk memastikan efektivitas dan

efisiensi pembangunan melalui koordinasi antar instansi pemerintah, dan memanfaatkan teknologi informasi.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja atau kontrak kinerja adalah janji untuk melaksanakan amanat pencapaian kinerja yang harus dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja tersebut dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.

Dokumen penetapan kinerja sebagai dokumen perjanjian kinerja diturunkan dari RPJMD dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), melalui proses penganggaran yang dimulai dari musrenbang, penyusunan RKPD, penyusunan KUA-PPAS sampai dengan APBD disahkan melalui PERDA, dokumen RKT tersebut menjadi rencana kinerja yang definitive menjadi Penetapan Kinerja. Dokumen penetapan kinerja tersebut di dibuat setelah APBD disetujui dan disahkan oleh DPRD. Ditingkat OPD dokumen penetapan kinerja di buat oleh Kepala OPD, yang berisi janji dari Kepala OPD kepada Walikota untuk mencapai sasaran dan target indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMD), ditingkat kota dokumen penetapan kinerja dibuat oleh Walikota untuk disampaikan kepada Presiden melalui menPAN dan Reformasi Birokrasi.

Perjanjian kinerja masing - masing urusan pemerintahan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kecamatan Palaran dalam tahun 2024 selengkapnya dituangkan dalam formulir penetapan kinerja.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Palaran Tahun 2024 sebagaimana terdapat pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Kecamatan Palaran Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Nilai Indeks Mutu Pelayanan Publik	88,31
2	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	83%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 11.263.402.406,00	
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 4.141.040.000,00	
2	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Rp 20.021.671.056,00	
JUMLAH		Rp 35.426.113.462,00	
TERBILANG		<i>// Tiga Puluh Lima Milyar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah //</i>	

Dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.3.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.3.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.3.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.3.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.3.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.3.7. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 1.3.8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.4.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.4.2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- 1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.5.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.5.2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.5.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.6.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.6.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.6.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 1.6.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - 2.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 2.1.1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - 3.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - 3.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - 3.1.2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - 3.1.3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 - 3.1.4. Evaluasi Kelurahan
 - 3.2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

3.2.1. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum, atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Kantor Kecamatan Palaran selaku pengemban amanah masyarakat di wilayah Kecamatan Palaran melaksanakan kewajiban melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut dapat memberikan gambaran mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja Kecamatan Palaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Nilai dan Kategori Predikat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Nilai	Kategori/Predikat
>90-100	AA / Sangat Memuaskan
>80-90	A / Memuaskan
>70-80	BB / Sangat Baik
>60-70	B / Baik
>50-60	CC / Cukup / Memadai
>30-50	C / Kurang
>0-30	D / Sangat Kurang

Sumber data Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja organisasi adalah kinerja yang dilaksanakan oleh Kecamatan Palaran berdasarkan tugas dan fungsinya. Pencapaian kinerja organisasi dapat diukur dari perjanjian kinerja yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja adalah penilaian pencapaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai kontribusi bagi proses penilaian dan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan atas penetapan kinerja sesuai program dan kegiatan, tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Tujuannya adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Sesuai ketentuan indikator kinerja OPD minimal meliputi keluaran (output) dan hasil (outcome) yang artinya adalah :

1. Keluaran (output) adalah segala sesuatu serupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik sebagai sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
2. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran Kinerja merupakan salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran strategis dan indikator kinerja serta target dan realisasinya berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Palaran tahun 2024 sesuai dengan Renstra dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Capaian indikator kinerja Kecamatan Palaran tahun 2024 sebagaimana tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	2024		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	88,31	87,23	98,78
2	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Disetujui	83%	99,66%	120

Berdasarkan pencapaian realisasi dari target yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Palaran ada 2 (dua) sasaran yang melalui analisis atas sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah dicapai yaitu sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD

Kualitas pelayanan publik merupakan sebuah indikator utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mulai pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Bahkan Kementerian PANRB mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penghargaan bagi instansi pemerintah yang melakukan pengembangan dan Inovasi Pelayanan Publik. Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat bagi instansi penyelenggara pelayanan publik.

Sebelumnya survey kepuasan masyarakat diatur dalam Kep Menpan Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah namun dikarenakan belum mengacu kepada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan perlu adanya keselarasan dengan Standar Pelayanan maka diubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berdasarkan Permenpan No. 16 Tahun 2014, survey kepuasan masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. Melalui survey ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik. Ruang lingkup survey kepuasan masyarakat ini didasarkan pada UU Pelayanan Publik yakni persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan, dan penanganan pengaduan, saran serta masukan.

Survei Kepuasan Masyarakat atau SKM harus dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik secara berkelanjutan sebagai dasar peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan public dengan jangka waktu minimal 1 tahun sekali.

Capaian indikator kinerja sasaran strategis 1 tahun 2024 tercantum pada tabel 3.3. berikut :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2023		2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 Terhadap Renstra (%)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,33	93,85	88,31	87,23	98,78	89,05	181,08
Rata-rata Capaian Kinerja						90,54		90,54

Indikator kinerja sasaran strategis 1 tahun 2024 dengan target 88,31 capaian kinerjanya 87,23, pada tahun 2023 target kinerja 84,33 capaian kinerja 93,85. Dari tabel tersebut terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2024 lebih kecil dibandingkan 2023, beberapa hal yang mempengaruhi capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut adalah kurangnya pemahaman masyarakat untuk mengisi kuesioner survey kepuasan masyarakat yang sebelumnya di bagikan langsung pada saat masyarakat menggunakan layanan di kecamatan kemudian beralih dengan menggunakan sistem online.

Formulasi penghitungan % Realisasi = $\text{Target/Realisasi} \times 100$

Formulasi Rata-rata Capaian Kinerja =

$\text{Realisasi tahun 2023} + \text{Realisasi tahun 2024}/2$

Sasaran 2	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan
-----------	--

Kualitas Hidup adalah persepsi atau pandangan subjektif individu terhadap kehidupannya dalam konteks budaya dan nilai yang dianut oleh individu dalam hubungannya dengan tujuan personal, harapan, standar hidup dan perhatian yang mempengaruhi kemampuan fisik, psikologis, tingkat kemandirian, hubungan sosial dan lingkungan.

Meningkatnya kualitas hidup tentunya akan berpengaruh terhadap peningkatan kapasitas dan kapabilitas individu tersebut, sehingga akan berpengaruh juga terhadap peningkatan kualitas hidup, kapasitas dan kapabilitas masyarakat. Beberapa cara untuk meningkatkan kualitas hidup adalah :

1. Percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin
2. Peningkatan kualitas sumber daya
3. Pemantapan reformasi dan birokrasi di bidang hukum dan bidang keamanan
4. Penguatan perekonomian domestic berdaya saing yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan energy
5. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sasaran ke dua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda adalah termasuk dalam 10 (sepuluh) program Unggulan Walikota Samarinda, dalam program unggulan kesatu yaitu :

“Program Pemberdayaan RT (alokasi 100-300 juta per RT per tahun)”

Program Pemberdayaan Masyarakat tersebut untuk mendukung percepatan kesejahteraan dan peningkatan pembangunan kewilayahan berbasis RT dengan prinsip transparan, partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan. Program pemberdayaan masyarakat atau Pro Bebaya diatur dalam Perwali Nomor 12 Tahun 2021 tentang teknis pelaksanaan Probebaya. Probebaya terdiri dari beberapa bidang yakni :

1. Bidang infrastruktur yang meliputi pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana umum,
2. Bidang ekonomi,
3. Bidang sosial budaya,
4. Bidang kesehatan, dan
5. Bidang pendidikan.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2023		2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 Terhadap Renstra (%)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	82	99,58	83	99,66	120,07%	89,05	199,24%
Rata-rata Capaian Kinerja						99,62		99,62

Pada tahun 2024 target pada indikator persentase usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang disetujui sebesar 83 dengan realisasi sebesar 99,66 atau persentase realisasi sebesar 120,07%.

Tercapainya target pada sasaran strategis 2 dipengaruhi oleh beberapa factor, antara lain yaitu :

1. Tersedianya anggaran probebaya
2. Peran aktif Ketua RT dan Masyarakat dalam pelaksanaan program unggulan Walikota Samarinda.
3. Dukungan dari stakeholder
4. Manfaat dari sasaran strategis 2 langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama untuk infrastruktur mengingat di wilayah Kecamatan Palaran masih banyak infrastruktur yang belum memadai.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Palaran, berdasarkan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja maka dapat disampaikan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu/sebelumnya dan beberapa tahun terakhir.

Hasil dari perhitungan pengukuran kinerja yang ditetapkan dalam analisis dan evaluasi terhadap realisasi perencanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam hal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja yang telah dibuat dalam penetapan kinerja dan indikator kinerja utama sesuai dengan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk mengetahui realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.5
Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

No.	Indikator Kinerja	Satuan	LKj Tahun 2022		LKj Tahun 2023		LKj Tahun 2024		Capaian Tahun 2023	Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	77,55	87,15	84,33	93,85	88,31	87,23	98,77	Kecamatan Palaran
2	Presentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	persen	65	100	82	99,58	83	99,66	100%	

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa :

1. Pada indikator kinerja Indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2022 target 77,55 realisasi sebesar 87,15, pada tahun 2023 target sebesar 84,33 realisasi 93,85 dan pada tahun 2024 target 87,23 realisasi 98,77, dari target dan realisasi tersebut terlihat bahwa pada tahun 2022 dan 2023 realisasi melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2024 capaian realisasi sebesar 98,77% atau tidak mencapai target, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat dalam mengisi kuesioner yang dibagikan secara online.
2. Pada indikator kinerja persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yng terbangun dan jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan Masyarakat di kelurahan pada tahun 2022 target 65 % capaian kinerja sebesar 100% , pada tahun 2023 target 82% capaian realisasi 99,58%, dan pada tahun 2024 target 83% capaian kinerja sebesar 99,66%, pada indikator kinerja ini selama 3 (tiga) berturut-turut capaiannya melampaui target. Faktor pendorong tercapainya target tersebut adalah tersedianya anggaran sesuai dengan kebutuhan, dukungan dari stakeholder dan peran aktif Masyarakat dalam melaksanakan kegiatan probebaya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Renstra Organisasi

Membandingkan target Renstra dan realisasi dari tahun sebelumnya dengan tahun 2024. Realisasi kinerja tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya sesuai dengan target Renstra Kecamatan Palaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra			Realiasi			Keterangan
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	77,55	84,33	88,31	87,15	93,85	87,23	
2	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Disetujui	%	65	82	83	100	99,58	99,66	

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Kecamatan Palaran tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Analisis Pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Nilai Indikator Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 dengan target sebesar 88,31 dan realisasi 87,23. Target nilai IKM tahun 2023 sebesar 84,33 dengan realisasi 93,85 dan tahun 2022 target 77,55 realisasi 87,15.

- Dari hasil survey menunjukkan bahwa unsur secara keseluruhan dari 9 (Sembilan) unsur penilaian memberikan penilaian yang seimbang dan merata.
- Untuk meningkatkan mutu pelayanan publik di Kecamatan Palaran juga terus diupayakan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang representative.

- Bimbingan Teknis bagi petugas pelayanan dalam rangka memberikan pelayanan public sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

2. Analisis Pencapaian Indikator Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Disetujui

Target pada indikator ini sebesar 83% dan capaian realisasi sebesar 99,66%.

- Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana digunakan untuk membiayai pelayanan sosial yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat, sedangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri, yang selanjutnya diharapkan terwujudnya Kelurahan yang mandiri.
- Peran aktif Masyarakat dalam kegiatan Probebaya

Hambatan dan Tantangan Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Hambatan dan tantangan dalam melaksanakan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 1 Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD

Hasil survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan dengan capaian 87,23 dari target 88,31, beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public antara lain :

- a. Kurangnya pemahaman mengenai UU No.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan Permenpan No.36 tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan.
- b. Masih adanya keluhan masyarakat melalui media sosial maupun kontak layanan pengaduan mengenai ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

- c. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM di Kecamatan dan Kelurahan
- d. Ketidaksiapan beberapa SDM sebagai motor yang menggerakkan sistem dan mekanisme pelayanan yang mulai beralih kepada sistem pelayanan berbasis IT

2. Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan

Hambatan dan tantangan dalam merealisasikan capaian indikator kinerja sasaran ke 2 (dua) adalah :

- a. Keterlambatan Pokmas dalam menyampaikan laporan kegiatan untuk keperluan SPJ.
- b. Peran Pendamping Probebaya belum maksimal

Alternatif Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan tantangan dalam pencapaian target dan indikator kinerja adalah :

1. Mengikut sertakan ASN dan Non ASN dalam bimbingan teknis atau pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Samarinda untuk penguatan kapasitas SDM di lingkungan Kecamatan Palaran
2. Penanganan keluhan pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat
3. Usulan penambahan SDM melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Samarinda
4. Antusiasme masyarakat terhadap Probebaya dan telah banyak dirasakan manfaatnya sehingga program-program yang langsung bersentuhan kepada tingkat kesejahteraan masyarakat perlu di tingkatkan untuk tahun-tahun mendatang.
5. Peningkatan kualitas SDM anggota Pokmas dan Pendamping Probebaya.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Dalam melaksanakan Program

dan kegiatan, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Kecamatan Palaran. Efisiensi penggunaan sumber daya Kecamatan Palaran tahun 2024 seperti tercantum dalam tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kecamatan Palaran tahun 2024

NO	PERJANJIAN KINERJA		% TARGET CAPAIAN KINERJA (100%)	TARGET BIAYA	PENYERAPAN ANGGARAN	%TINGKAT EFISIENSI SD
	SASARAN	INDIKATOR KINERJA				
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Nilai IKM	100%	15.964.898.973	15.641.354.013	2,03%
2	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Yang Disetujui	100%	19.841.671.056	19.773.920.293	0,34%
Efisiensi SD keseluruhan			100%	35.806.570.029	35.415.274.306	1,09%

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Kecamatan Palaran dilakukan dengan cara membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Sasaran 1 Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Pelayaan OPD dengan target capaian kenerja 100%, target biaya sebesar Rp. 15.964.898.973,00 dan penyerapan anggaran sebesar Rp. 15.641.354.013,00 persentase tingkat efisiensi anggaran sebesar 0,34%.

1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pengeluaran anggaran berdasarkan kebutuhan riil sehingga sisa anggaran tidak dipergunakan karena kebutuhan tercukupi. Contoh dari hal tersebut adalah Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

- b. Terdapat beberapa sub-sub anggaran pencapaian output yang direalisasikan hanya sesuai dengan kebutuhan tetapi tidak berpengaruh pada pencapaian target.
 - c. Anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 11.846.986.973,00 dengan realisasi sebesar Rp. 11.741.783.151,00 dan tingkat efisiensi sumber daya sebesar 0.89%.
- 1.2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- a. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik hanya terdapat 1 (satu) sub kegiatan yaitu Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dari sub kegiatan tersebut anggaran yang direalisasikan sesuai dengan pelaksanaan kegiatan masing-masing seksi.
 - b. Pada program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pagu anggaran sebesar Rp. 4.029.925.956,00 realisasi sebesar Rp. 3.899.570.862,00 dan tingkat efisiensi sumber daya sebesar 5,30%.
2. Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan dengan target capaian kinerja sebesar 100%, target biaya sebesar Rp.19.841.671.056,00, dengan penyerapan anggaran Rp. 19.773.920.293,00, tingkat persentase efisiensi anggaran sebesar 0,34%.
- 2.1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- a. Pada program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan sub kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di laksanakan seluruhnya dengan persentase realisasi keuangan sebesar 99,66 dari anggaran Rp. 20.021.671.056,00 realisasi sebesar Rp. 19.943.989.347,00, efisiensi anggaran sebesar 0,34%.
3. Efisiensi penggunaan sumber daya secara keseluruhan adalah sebesar 1.09%

Pengukuran efisiensi penggunaan anggaran untuk sasaran strategis 1 sebagaimana tercantum dalam tabel 3.8. berikut :

Tabel 3.8.
Pengukuran Efisiensi Penggunaan Anggaran Untuk Sasaran Strategis 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Efisiensi
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Nilai IKM	99,78	99,12	0,66

Formulasi perhitungan tingkat efisiensi : % indikator capaian kinerja di kurangi % penyerapan anggaran. Pada sasaran strategis 1 persentase capaian kinerja 99,78 dan persentase penyerapan anggaran sebesar 99,12 dengan tingkat efisiensi sebesar 0,66

Pengukuran efisiensi penggunaan anggaran untuk sasaran strategis 2 sebagaimana terdapat pada tabel 3.9 berikut :

Tabel 3.9.
Pengukuran Efisiensi Penggunaan Anggaran Untuk Sasaran Strategis 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Yang Disetujui	99,01	99,01	0

Persentase efisiensi pada sasaran strategis 2 dengan indikator persentase usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat yang disetujui sebesar 0, atau persentase capaian kinerja dan persentase penyerapan anggaran sama yaitu sebesar 99,01.

6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan / Mengakibatkan Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada tahun 2024 menandakan telah efektifnya pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 dan anggaran yang menunjang kegiatan tersebut telah direalisasikan secara efisien untuk mencapai target kinerja dan menghasilkan output-nya masing-masing. Hal ini disebabkan selain karena adanya komitmen dan tanggung jawab bersama untuk mencapai target kinerja masing-masing, juga karena adanya kegiatan-kegiatan yang dikhususkan untuk melakukan perencanaan, monitoring, dan evaluasi internal.

Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja kecamatan Palaran tahun 2024 adalah terdiri dari beberapa faktor yaitu :

1. Faktor Internal :

- a. Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan
Dengan berpedoman kewenangan yang dimiliki kecamatan maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA OPD secara konsisten sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
- b. Kerjasama antar Seksi
Kerjasama antar seksi sangat diperlukan dalam rangka penguatan integritas. Pemberian motivasi, arahan dan bimbingan bagi pegawai untuk menjaga kualitas kinerja sumber daya manusia yang tersedia. Keterbatasan sumber daya manusia dijadikan pemicu semangat untuk meningkatkan dedikasi bagi seluruh pegawai untuk dapat mengemban amanah sesuai dengan program kerja yang ada.
- c. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja
Monitoring dan evaluasi terhadap seluruh program kerja harus dilakukan agar pimpinan dapat mengetahui pelaksanaan program kerja dan kendala apa yang dihadapi sehingga dapat dicarikan alternative solusinya.

2. Faktor Eksternal

a. Partisipasi Masyarakat (*Society Participation*)

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kegiatan, khususnya untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

b. Peran Lembaga Sosial Kemasyarakatan (*Public Social Institution*)

Lembaga social kemasyarakatan yang berperan dalam pembangunan antara lain LPM, TP, PKK, RT. Keterlibatan lembaga sosial kemasyarakatan tersebut dimulai dari proses perencanaan kegiatan sampai dengan pelaksanaannya

B. Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda tahun 2024 untuk Kecamatan Palaran telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 35.898.593.985,00 yang digunakan untuk untuk membiaya 3 (tiga) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan dengan realisasi sebesar Rp. 35.585.343,00 atau sebesar 99,13% dengan rincian sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.10

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Kecamatan Palaran Tahun 2024

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
Kecamatan Palaran	35.898.593.985,00	35.585.343.360,00	99,13%
Kecamatan Palaran	14.672.316.529,00	14.576.771.099,00	99,35%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.645.329.556,00	2.664.918.894,00	100,74%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.645.329.556,00	2.664.918.894,00	100,74%

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.645.329.556,00	2.664.918.894,00	100,74%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	180.000.000,00	170.069.054,00	94,48%
Pemberdayaan Kelurahan	80.000.000,00	70.928.500,00	88,66%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	30.000.000,00	20.929.000,00	69,76%
Evaluasi Kelurahan	50.000.000,00	49.999.500	100,00%
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100.000.000,00	99.140.554,00	99,14%
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	100.000.000,00	99.140.554	99,14%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.846.986.973,00	11.741.783.151,00	99,11%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000,00	147.671.940,00	98,45%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.000.000,00	73.071.280	97,43%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000,00	49.600.660	99,20%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.820.224.126,00	9.804.142.235,00	99,84%

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.287.729.246,00	8.284.481.421	99,96%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.482.494.880,00	1.474.616.814	99,47%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000,00	45.044.000	90,09%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	572.752.300,00	540.725.855,00	94,41%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.969.300,00	9.969.300,00	100,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	350.000.000,00	345.690.000,00	98,77%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.420.000,00	17.420.000,00	100,00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.596.000,00	42.943.500	60,83%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	-	#DIV/0!
Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	11.940.000,00	99,50%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112.767.000,00	112.763.055,00	100,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	625.995.000,00	625.995.000,00	100,00%
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	189.765.000,00	189.765.000,00	100,00%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	436.230.000,00	436.230.000,00	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	333.628.997,00	315.542.771,00	94,58%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	282.128.997,00	264.042.771,00	93,59%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00%

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.000.000,00	39.000.000,00	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	344.386.550,00	307.705.350,00	89,35%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	167.473.550,00	164.742.500,00	98,37%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.000.000,00	50.863.850	70,64%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.930.000,00	42.580.000	85,28%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.983.000,00	34.725.000	99,26%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	14.794.000	73,97%
Kelurahan Bantuas	1.930.141.484,00	1.899.550.679,00	98,42%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	221.921.280,00	193.354.000	87,13%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.023.600.000,00	1.023.600.000,00	100,00%

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	634.620.204,00	632.596.679	99,68%
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%
Kelurahan Bukuan	5.656.956.880,00	5.629.174.721,00	99,51%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	221.921.280,00	206.412.994,00	93,01%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.349.400.000,00	3.343.531.983,00	99,82%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.035.635.600,00	2.029.229.744	99,69%
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
Kelurahan Simpang Pasir	3.180.314.680,00	3.103.506.241,00	97,58%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	221.921.280,00	145.260.000,00	65,46%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.801.500.000,00	1.801.500.000,00	100,00%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.106.893.400,00	1.106.746.241,00	99,99%
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%
Kelurahan Rawa Makmur	6.218.039.580,00	6.146.915.788,00	98,86%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	221.921.280,00	204.103.694,00	91,97%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.699.400.000,00	3.699.306.000,00	100,00%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.246.718.300,00	2.195.396.094	97,72%
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	48.110.000,00	96,22%
Kelurahan Handil Bakti	4.240.824.832,00	4.229.424.832,00	99,73%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	496.921.280,00	485.521.280	97,71%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.291.500.000,00	2.291.500.000,00	100,00%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.402.403.552,00	1.402.403.552,00	100,00%
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%

Realisasi anggaran Kecamatan Palaran pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2023 dan 2022. Persentase kenaikan realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 2,82% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023.

Kenaikan dan penurunan realisasi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu

1. Faktor kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran;
2. Kurang tepatnya pelaksanaan rencana aksi atas kinerja secara berkala kegiatan dalam DPA;
3. Kurang tepatnya penyelesaian keuangan (SPJ) dalam pelaksanaan rencana anggaran kas
4. Adanya tambahan pagu dan rasionalisasi pada beberapa sub kegiatan di perubahan anggaran, serta waktu pelaksanaan kegiatan yang pendek berpengaruh pada realisasi anggaran;
5. Terdapat efisiensi anggaran dari beberapa sub kegiatan

C. Prestasi/Penghargaan

Prestasi atau penghargaan yang diraih Kecamatan Palaran tahun 2024 adalah merupakan pencapaian di berbagai bidang. Penghargaan diberikan atas kontribusi dan prestasi dalam bidang tertentu. Beberapa prestasi/penghargaan yang diraih Kecamatan Palaran pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Juara II Lomba Inovasi Daerah (Baimbai) Tingkat Kota Samarinda yang diraih oleh TTG Posyantek Patra Maju Kelurahan Bukuan;

2. Juara I dan Juara III Lomba Teknologi Tepat Guna
3. Juara I Lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tingkat Kota Samarinda yang di raih oleh Kelurahan Bukuan;
4. Juara Harapan 3 Lomba Perpustakaan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 di raih oleh Kelurahan Bukuan
5. Juara IV pada Probebaya Award tahun 2024 bidang Pemberdayaan Masyarakat diraih oleh RT. 35 Kelurahan Bukuan;
6. Juara 7 Lomba Kampung Salai diraih oleh RT. 35 Kelurahan Bukuan
7. Pembina TP. UKS/M terbaik II oleh Tim Pembina UKS Kecamatan Palaran;
8. Piagam Penghargaan dari Walikota Samarinda sebagai Penyelenggara Kecamatan Layak Anak (Kelana).

D. Penilaian Kinerja Organisasi

Penilaian kinerja organisasi adalah proses evaluasi yang sistematis untuk mengukur sejauh mana sebuah organisasi mencapai tujuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta merumuskan strategi untuk perbaikan sejalan dengan upaya mewujudkan kinerja yang prima.

Penilaian Kinerja Organisasi pada setiap tingkatan entitas akuntabilitas kinerja dilakukan dengan memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu capaian Perjanjian Kinerja dan Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Capaian Perjanjian Kinerja

Capaian Perjanjian Kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementrian/Negara/Lembaga, Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Pemerintah Daerah, dan Entitas Akuntabilitas Kinerja Organisasi setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

2. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga dan Entitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah. Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada entitas akuntabilitas kinerja dalam kementerian/lembaga dan entitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah diterbitkan oleh Inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah.

Perhitungan Penilaian Kinerja Organisasi

1. Normalisasi capaian perjanjian kinerja

Dengan memperhatikan prinsip penilaian kinerja organisasi yaitu prinsip yang berorientasi hasil serta mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja instansi dan unit/satuan kerja, maka dipandang perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut :

- Jika capaian kinerja setiap indikator $\geq 110\%$ maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan
- Jika capaian kinerja setiap indikator $\leq 110\%$ maka tidak dilakukan normalisasi.

2. Koreksi normalisasi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Setelah normalisasi capaian perjanjian kinerja dilakukan terhadap masing-masing indikator maka hasil normalisasi tersebut dikoreksi dengan memperhatikan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi faktor koreksi besaran capaian perjanjian kinerja yang disampaikan melalui laporan kinerja. Semakin tinggi predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah semakin tinggi pula capaian perjanjian kinerja yang di akui.

Koreksi capaian Perjanjian Kinerja berdasarkan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.11
Koreksi Capaian Perjanjian Kinerja Berdasarkan Predikat Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah

PREDIKAT AKIP	KOREKSI CAPAIAN PK SETELAH NORMALISASI
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	

3. Nilai Akhir Capaian Perjanjian Kinerja

Nilai akhir capaian perjanjian kinerja merupakan hasil perkalian normalisasi capaian perjanjian kinerja (langkah 1) dengan hasil pengurangan 100% dan koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (langkah 2)

4. Total Capaian Perjanjian Kinerja

Total capaian perjanjian kinerja merupakan hasil penjumlahan seluruh nilai akhir capaian Perjanjian Kinerja (langkah 3) pada setiap indikator kinerja

5. Nilai Kinerja Organisasi

Nilai kinerja organisasi merupakan hasil penghitungan dari total capaian perjanjian kinerja (langkah 4) di bagi dengan jumlah indikator kinerja

6. Predikat Penilaian Kinerja Organisasi

Hasil Penilaian Kinerja Organisasi dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu :

1. Sangat Kurang
2. Kurang
3. Butuh Perbaikan
4. Baik
5. Istimewa

Penilaian Kinerja Organisasi pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Samarinda, Kecamatan Palaran sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terakhir yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Samarinda predikat akuntabilitas kinerja Kecamatan Palaran pada Pemerintah Kota Samarinda adalah "**BB**".
- b. Capaian kinerja Kecamatan Palaran pada tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam tabel 3.13 berikut :

Tabel 3.12

Penilaian Kinerja Organisasi Kecamatan Palaran Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) (1) x (100%-(2))
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,31	87,23	98,77%	98,77%	10%	89,00%
2	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	83%	99,66	120%	110%	15%	99,00%
							Total Capaian PK (4)	188,00%
							Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5)	90,05%
							Predikat PKO (6)	BAIK

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran strategis dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2024. Pengukuran kinerja LAKIP 2024 ini didasarkan atas objektivitas, kejujuran dan ketransparanan sebagaimana diamanahkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Di dalam LAKIP 2024 disajikan informasi tentang :

1. Pencapaian sasaran strategis organisasi.
2. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah disempurnakan.
3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja baik dari segi pemenuhan, kualitas dan pemanfaatan/implementasi.
4. Evaluasi atas pencapaian sasaran strategis tahun berjalan dan juga evaluasi tahun sebelumnya.

B. Saran

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan terkait dengan akuntabilitas kinerja 2024 yaitu:

1. Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan / kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.
2. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja diperlukan adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf, berorientasi pada pencapaian visi dan misi, menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Jujur, objektif, transparan, inovatif, akuntabel, efektif dan efisien.

Sesuai dengan hasil analisis dan evaluasi, ada beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam melaksanakan pembangunan, penyusunan anggaran dan penyusunan LAKIP yaitu sebagai berikut :

1. Dalam penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan dilakukan lebih cermat dan akurat, dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan berdasarkan indikator Kinerja yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dievaluasi dan diukur kinerjanya secara lebih akurat agar tujuan dan sasaran dari Visi dan Misi pembangunan Kota Samarinda dapat tercapai.
2. Dalam menyusun anggaran belanja rutin perlu adanya standarisasi anggaran dan prioritas pada masing-masing SKPD, sehingga dana yang digunakan masing-masing unit kerja bisa mencukupi untuk menjalankan kegiatannya.
3. Penginputan RKA kedalam aplikasi SIPD agar dilakukan pada hari kerja, mengingat SDM di Kecamatan Palaran sangat terbatas.
4. Aplikasi SIPD sering mengalami gangguan sehingga menghambat proses penginputan.

5. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Penetapan/Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi sesuai dengan yang telah disepakati.

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
KECAMATAN PALARAN TAHUN 2024**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kinerja Dan Pelayanan OPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	88.31
2	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapanilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Disetujui	83%



Samarinda, 10 Januari 2024

Gubernur

Muhammad Dahlan, S.STP., M.Si.

NIP. 198005071999121001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN PALARAN

Jl. Ampera RT. 46 Kelurahan Rawa Makmur Palaran
Samarinda (Kalimantan Timur) Kode pos 75243

<https://kec-palaran.samarindakota.go.id/>

Email: kecamatan.palaran@samarakota.go.id

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN PALARAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Jamal Yanto, S.Sos., M.Si.**

Jabatan : **Camat Palaran**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Andi Harun**

Jabatan : **Walikota Samarinda**

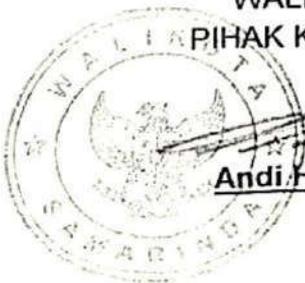
Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 23 Januari 2024

WALIKOTA
PIHAK KEDUA,



Andi Harun

CAMAT
PIHAK PERTAMA,

Jamal Yanto, S.Sos., M.Si.
NIP. 196601271986091001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN PALARAN**

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Nilai Indeks Mutu Pelayanan Publik	88.31
2	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	83%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 11,263,402,406.00	
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 4,141,040,000.00	
2	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Rp 20,021,671,056.00	
JUMLAH		Rp 35,426,113,462.00	
TERBILANG		<i>// Tiga Puluh Lima Milyar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah //</i>	

Samarinda, 23 Januari 2024

Camat

(Signature)
Jamal Yanto, S.Sos., M.Si.
NIP. 196601271986091001



Walikota

(Signature)
Andi Harun

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN PALARAN**

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Realisasi
1	Meningkatnya Kinerja Dan Pelayanan OPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	88.31	87.23	98.78
2	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapanilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Disetujui	83%	99.66%	120.07



Samarinda, 10 Januari 2024

Camat

Muhammad Dahlan, S. STP., M.Si.

Nip. 198005071999121001

**EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2024
KECAMATAN PALARAN**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	EFISIENSI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Nilai IKM	99.78	99.12	0.66
2	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Yang Disetujui	99.01	99.01	0

Samarinda, 10 Januari 2024



Camat

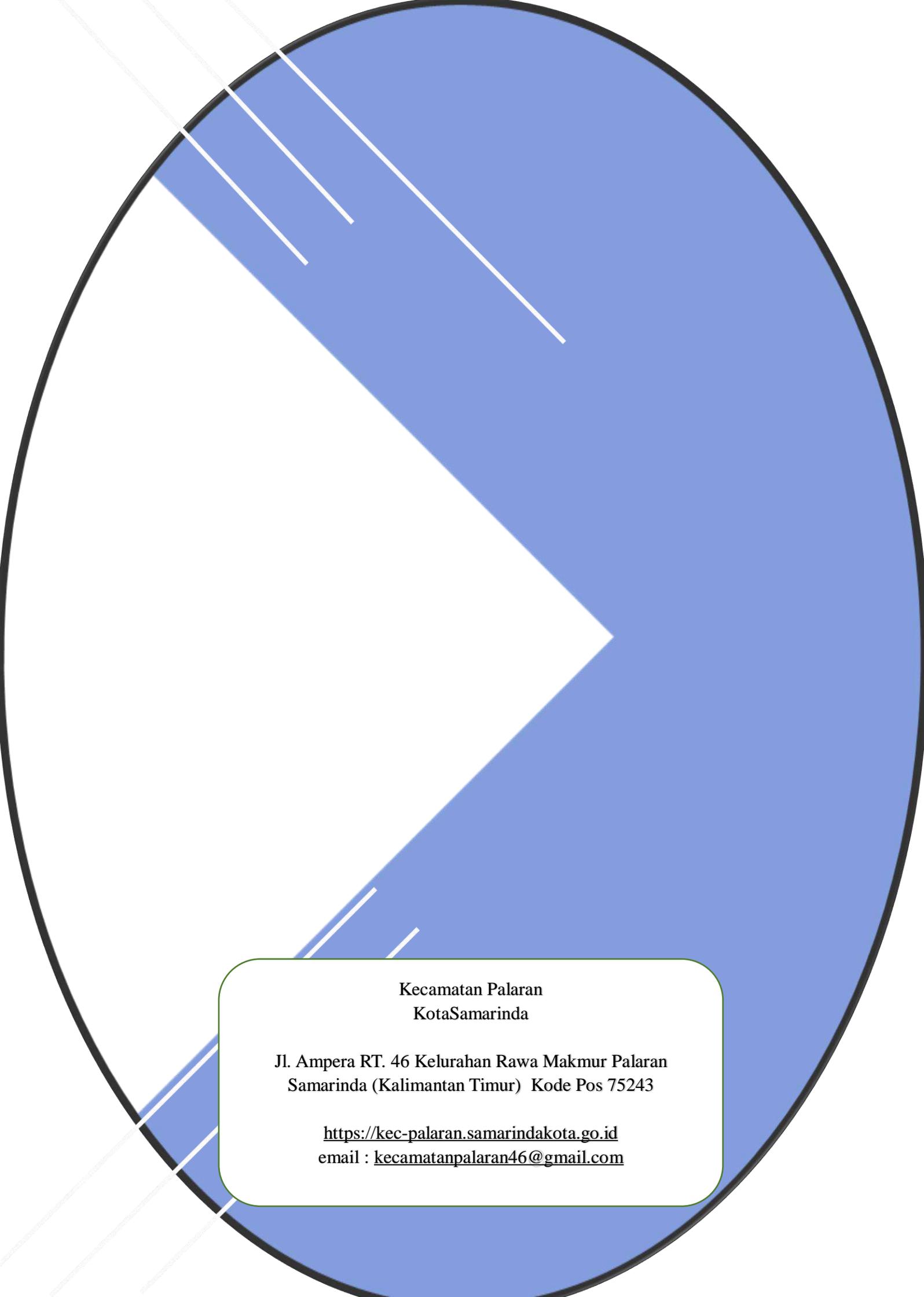
Muhammad Dahlan, S.STP., M.Si.

NIP. 198005071999121001

No.	Tanggal	Pendidikan	Pekerjaan	J/K	Usia	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
JUMLAH NILAI PER UNSUR PELAYANAN						119	120	122	144	120	122	119	144	121
NRR PER UNSUR PELAYANAN						3.306	3.333	3.389	4	3.333	3.389	3.306	4	3.361
NRR TERTIMBANG						0.367	0.37	0.377	0.444	0.37	0.377	0.367	0.444	0.373
IKM UNIT PELAYANAN						87.23					Baik			

Jumlah responden: 36

Waktu cetak: 03/01/2025 10:48:03



Kecamatan Palaran
KotaSamarinda

Jl. Ampera RT. 46 Kelurahan Rawa Makmur Palaran
Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos 75243

<https://kec-palaran.samarindakota.go.id>
email : kecamatanpalaran46@gmail.com